



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3011-3023

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dampak Pengembangan Objek Wisata Pulau Kumayan Kota Bengkulu

Ella Martina Chayati^{1✉}, Sri Indarti², Titi Darmi³, Rekho Adriadi⁴

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: ellamartina484@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengembangan objek wisata Pulau Kumayan di Kota Bengkulu terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka tata kelola yang baik (good governance). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari Sembilan informan yang terdiri atas pengelola wisata, pengawas lapangan, petugas parkir, masyarakat sekitar dan pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata memberikan kontribusi ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan peluang usaha serta berdampak pada interaksi sosial yang lebih intens antara masyarakat sekitar dan wisatawan. Namun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan masih terbatas dan cenderung bersifat musiman. Selain itu, ditemukan masalah lingkungan terkait pengelolaan sampah dan potensi kerusakan hutan bakau. Dari aspek tata kelola praktik transparansi dan akuntabilitas belum cukup optimal, terutama dalam penyajian data keuangan dan peran serta publik dalam pengawasan. Penelitian ini menggunakan teori dampak pariwisata (Mathieson & Wall, 1982) dan prinsip good governance (UNDP, 1997) sebagai dasar analisis. Disimpulkan bahwa keberlanjutan pengembangan Pulau Kumayan memerlukan tata kelola yang lebih transparan, paarticipatif dan akuntabel agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kata Kunci: *Pengembangan Wisata, Pulau Kumayan, Dampak Pariwisata, Good Governance, Kota Bengkulu*

Abstract

This study aims to analyze the impact of the development of the Kumayan island tourist attraction in Bengkulu city on economic, social and environmental aspects within the framework of good governance. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observation and documentation from nine informants consisting of tourism managers, field supervisors, parking attendants, local residents and visitors. The results of the study indicate that tourism development provides economic contributions in the form of increased income and impacts more intense social interactions between the local community and tourists. However, community participation in managements is still limited and tends to be seasonal. In addition, environmental problems were found related to waste management and potential damage to mangrove forests. From the governance aspect, transparency and accountability practices are not optimal, especially in the presentation of financial data and public participation in oversight. This study uses the theory of tourism impacts (Mathieson & Wall, 1982) and the principles of good governance (UNDP, 1997) as the basis for analysis. It is concluded that the sustainable development of Kumayan island requires more transparent, participatory and accountable governance to be able to provide long-term benefits for the community and the surrounding environment.

Keywords: Tourism Development, Kumayan Island, Impact of tourism, Good Governance, Bengkulu City.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi pariwisata luar biasa, mulai dari keindahan alam, keragaman budaya, hingga warisan sejarah. Potensi ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Pengembangan pariwisata melibatkan berbagai elemen, seperti pemerintah, pelaku usaha, seniman, hingga masyarakat lokal (Oktaviani & Yuliani, 2023). Dengan pengelolaan yang tepat, pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat identitas budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Turambi et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, tren wisata berbasis minat khusus, seperti desa wisata dan wisata edukatif, semakin berkembang. Wisatawan kini tidak hanya mencari keindahan alam, tetapi juga pengalaman otentik yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas lokal. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata perlu diarahkan pada keberlanjutan, yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Konsep ini sejalan dengan teori dampak pariwisata dari Mathieson dan Wall (1982), yang menawarkan kerangka integratif

untuk mengkaji dampak pariwisata secara komprehensif (Nurhajati, 2018).

Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah yang menunjukkan pertumbuhan pariwisata cukup signifikan. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada Januari sampai April 2025 mencapai lebih dari 2,3 juta perjalanan, dengan Kota Bengkulu menjadi destinasi utama. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan tingginya minat wisatawan, tetapi juga menunjukkan peran strategis pariwisata dalam mendorong ekonomi lokal melalui sektor jasa, perhotelan, perdagangan, dan transportasi.

Salah satu destinasi yang mengalami pertumbuhan cepat adalah Pulau Kumayan, sebuah kawasan hutan mangrove yang telah dikembangkan menjadi taman wisata alam. Pulau ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat bersama pihak swasta, dengan berbagai fasilitas ramah keluarga dan harga terjangkau. Kehadiran wisata ini memberikan kontribusi ekonomi nyata, termasuk penciptaan lapangan kerja informal dan pemberdayaan usaha kecil. Namun demikian, proses pengembangannya masih menghadapi tantangan tata kelola yang belum optimal (Ratih & Najicha, 2021).

Fenomena di Pulau Kumayan menunjukkan adanya keterbatasan dalam hal partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan, serta keberlanjutan lingkungan. Meskipun sektor swasta cukup dominan dalam pengelolaan, partisipasi masyarakat masih bersifat musiman dan belum terstruktur. Selain itu, mekanisme retribusi dan distribusi manfaat belum sepenuhnya transparan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan keadilan tata kelola wisata lokal. Padahal, prinsip *good governance* sangat penting dalam memastikan keberlanjutan destinasi wisata berbasis komunitas.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur mengenai dampak pengembangan wisata Pulau Kumayan dengan pendekatan yang integratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi sosial ekonomi, tantangan lingkungan, serta praktik tata kelola yang diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan pariwisata yang lebih adil, transparan, dan partisipatif, serta mendorong Pulau Kumayan menjadi model pengembangan wisata berkelanjutan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Kumayan, Kota Bengkulu, selama Mei–Juni 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan

pendekatan kualitatif, bertujuan memahami secara mendalam dampak pengembangan wisata terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat sekitar. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan, keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan objek wisata, mengacu pada teori dampak pariwisata dari Mathieson & Wall (1982) serta prinsip *good governance*. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, melibatkan delapan orang yang terdiri dari pengelola, pelaku usaha, masyarakat, pengelola parkir, dan pengunjung (Anggito & Setiawan, 2018).

Sumber data terdiri dari data primer (hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan) serta data sekunder (dokumen, jurnal, laporan, dan sumber tertulis lainnya). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pedoman terstruktur dan bebas, observasi sistematis terhadap aktivitas wisata, serta dokumentasi dari media sosial dan referensi tertulis. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu, yang bertujuan menguji konsistensi dan keakuratan informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang dan metode (Rukin, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan sejak awal proses penelitian untuk menyaring dan menyederhanakan data penting. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif dan visual untuk mempermudah identifikasi pola dan tren. Verifikasi dilakukan dengan menelusuri hubungan sebab-akibat dan mengembangkan proposisi akhir yang menjadi dasar dalam menarik kesimpulan secara menyeluruh dan sistematis (Koyan, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak perkembangan objek wisata Pulau Kumayan di Kota Bengkulu, maka pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data di lapangan, hasil penelitian ditambihkan sebagai berikut:

Dampak Ekonomi

Perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah umumnya membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan wisatawan berperan penting dalam menciptakan perputaran uang di kawasan wisata, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal (Yakup, 2019). Pulau

Kumayan sebagai salah satu destinasi wisata baru di Kota Bengkulu turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi warga. Sebelum dikenal luas, masyarakat di sekitar kawasan ini mayoritas bekerja sebagai buruh harian atau petani musiman. Namun, seiring bertambahnya jumlah wisatawan, masyarakat mulai membuka usaha jasa dan dagang yang berorientasi pada kebutuhan wisata, seperti warung makan, penyewaan perahu, dan jasa parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola utama, Bapak Herman, Pulau Kumayan dikelola secara mandiri oleh keluarga dan masyarakat sejak tahun 2020. Dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti rumah pohon, perahu bebek, area karaoke, dan taman bermain anak, Pulau Kumayan menjadi destinasi yang ramai dikunjungi, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Pendapatan harian dari objek wisata ini berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp7.00.000 pada hari biasa, dan bisa melonjak dua kali lipat saat hari libur. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% disetorkan ke pemerintah daerah sebagai retribusi, yang diperkirakan mencapai Rp3.000.000 per bulan. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi ekonomi riil, baik bagi masyarakat maupun pemerintah kota, meskipun pengelolaan masih dilakukan secara sederhana dan manual.

. Selain pengelola utama, dampak ekonomi juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil lainnya. Misalnya, Bapak Roni, petugas parkir, menyatakan bahwa jumlah kendaraan yang masuk dapat mencapai 100 motor dan 20 sampai 30 mobil per hari saat ramai, dengan tarif parkir Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Demikian pula Bapak Hamdan, pengelola perahu bebek, menyampaikan bahwa pendapatannya saat hari libur dapat mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari angka yang jauh lebih besar dibandingkan penghasilannya sebelum bekerja di sektor pariwisata. Hal ini membuktikan bahwa sektor pariwisata menjadi alternatif pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat lokal.

Warga lainnya seperti Ibu Norry, seorang pedagang makanan ringan, juga merasakan manfaat ekonomi dari pengembangan Pulau Kumayan. Sebelumnya hanya membantu suami di rumah, kini beliau memiliki usaha sendiri yang berkembang saat akhir pekan dan hari libur. Namun, ia juga mengeluhkan sepi pengunjung pada hari kerja, yang membuat usahanya tidak beroperasi setiap hari. Meski demikian, kehadiran objek wisata ini telah membuka peluang kerja baru dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang stabil (Wisata, 2018).

Namun demikian, sejumlah kendala masih menjadi hambatan dalam optimalisasi dampak ekonomi dari pariwisata Pulau Kumayan. Keterbatasan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata serta kurangnya perawatan fasilitas membuat sebagian wisatawan enggan berkunjung, sebagaimana diungkapkan oleh pengunjung bernama Tika. Jalan yang masih berbatu dan licin saat hujan, serta beberapa fasilitas yang rusak, menjadi catatan penting bagi pengembangan ke depan. Meski Pulau Kumayan merupakan lahan pribadi dan belum ditetapkan sebagai kawasan wisata resmi, aktivitasnya telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi resmi yang disetorkan ke Bapenda Kota Bengkulu. Oleh karena itu, upaya perbaikan infrastruktur dan manajemen yang lebih profesional sangat dibutuhkan agar manfaat ekonominya dapat berkelanjutan dan lebih optimal.

Dampak Sosial

Pengembangan objek wisata Pulau Kumayan membawa dampak sosial yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Salah satu aspek utama yang mengalami perubahan adalah meningkatnya keterlibatan warga dalam aktivitas pengelolaan wisata, seperti kebersihan, keamanan, serta pelayanan terhadap pengunjung. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung secara ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap destinasi wisata tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat lokal, muncul dinamika sosial baru yang mencerminkan perubahan dalam struktur dan interaksi sosial warga (Paludai et al., 2025).

Dampak positif yang paling menonjol adalah meningkatnya semangat kebersamaan dan kolaborasi warga dalam menjaga kawasan wisata. Bapak Herman, selaku pengelola sekaligus tokoh masyarakat, menyatakan bahwa kehadiran wisata telah menjadi pemicu warga untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan pengelolaan fasilitas publik. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Pak Kholid, warga setempat, yang menyampaikan bahwa meskipun keterlibatan warga masih terbatas pada momen tertentu seperti hari besar atau musim ramai, namun inisiatif gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan wisata semakin tumbuh. Aktivitas ini mendorong penguatan ikatan sosial dan mempererat hubungan antarmasyarakat.

Perubahan sosial juga menuntut penyesuaian nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari warga. Seperti disampaikan oleh Ibu Lusi, interaksi dengan wisatawan dari berbagai latar belakang memaksa masyarakat untuk bersikap lebih terbuka dan ramah.

Namun, di saat yang sama, muncul kekhawatiran akan lunturnya norma adat setempat akibat perilaku pengunjung yang tidak selalu sesuai dengan nilai lokal, seperti tindakan kurang sopan atau berpakaian tidak pantas. Hal ini menunjukkan bahwa selain memberikan manfaat, pengembangan pariwisata juga berpotensi menimbulkan gesekan sosial dan ketegangan nilai budaya, apabila tidak diimbangi dengan edukasi serta kontrol sosial yang tepat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata Pulau Kumayan sejatinya telah mendorong penguatan identitas lokal dan pelestarian budaya. Pelibatan masyarakat tidak hanya memberi mereka ruang untuk berpartisipasi, tetapi juga memperkuat rasa bangga terhadap kearifan lokal yang dimiliki. Semakin aktif masyarakat dalam proses pengelolaan wisata, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh manfaat sosial yang lebih luas (Sary & Santoso, 2024).

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pengembangan wisata yang berkelanjutan. Dinas Pariwisata Kota Bengkulu telah memberikan pendampingan dan pelatihan kepada warga agar dapat mengelola destinasi wisata secara profesional dan mandiri. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keselarasan antara pertumbuhan wisata dan nilai sosial budaya yang berlaku. Dengan pendekatan partisipatif yang inklusif, pengembangan Pulau Kumayan diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan wisata berbasis komunitas yang tangguh secara sosial dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan di Pulau Kumayan menjadi perhatian utama bagi para pengelola dan masyarakat setempat. Pak Hermansyah, pengelola pulau, menjelaskan bahwa sejak kawasan ini mulai ramai dikunjungi, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu langkah konkret adalah pelatihan pengelolaan sampah organik, seperti daun dan ranting yang sebelumnya dibakar, kini diolah menjadi kompos dan digunakan untuk penghijauan. Selain itu, aturan tegas diterapkan agar staf dan pengunjung tidak membuang sampah plastik sembarangan, mengingat pulau ini merupakan ruang terbatas yang mudah terlihat dampak buruknya jika terjadi pencemaran (Maghfiroh, 2020).

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait kesadaran pengunjung terhadap kebersihan. Lusi, warga sekitar, mengungkapkan bahwa masih ada pengunjung yang

membuang sampah sembarangan, sehingga keberadaan petugas khusus kebersihan dianggap penting untuk pengawasan dan edukasi. Sementara itu, Pak Hamdan sebagai penjaga area tanaman aktif menjaga ekosistem dengan cara berkeliling mengingatkan pengunjung, menanam bibit pohon saat musim hujan, dan menjaga kelestarian kebun bambu serta pepohonan tua agar tidak ditebang sembarangan.

Di sisi lain, pengalaman pengunjung juga menunjukkan adanya aspek yang perlu diperbaiki. Ayu, salah satu pengunjung, menyatakan bahwa meskipun udara di Pulau Kumayan terasa sejuk berkat banyaknya pepohonan, ketersediaan tempat sampah masih minim dan kondisi toilet kurang bersih. Hal ini menjadi catatan penting bagi pengelola untuk meningkatkan fasilitas dasar demi menunjang kenyamanan dan keberlanjutan wisata yang ramah lingkungan.

Partisipasi (*Participacion*)

Hasil wawancara dengan pengelola lapangan, Bapak Djogis, mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat sekitar masih bersifat insidental dan belum terstruktur. Keterlibatan warga biasanya hanya terjadi pada momen-momen tertentu seperti hari raya, di mana sebagian membuka warung atau membantu pengelolaan parkir. Namun, untuk pengelolaan utama objek wisata, masih didominasi oleh pihak pengelola tanpa pelibatan resmi dari masyarakat setempat. Tidak adanya pelatihan atau sistem yang mengintegrasikan warga dalam pengelolaan tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam membangun partisipasi yang berkelanjutan (Negara et al., 2024).

Padahal, dalam prinsip tata kelola yang baik menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), partisipasi menekankan pentingnya pelibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program. Keterlibatan yang terstruktur tidak hanya memperkuat rasa memiliki terhadap aset wisata, tetapi juga mendorong pembangunan berbasis komunitas yang lebih inklusif. Ketidakterlibatan masyarakat secara sistematis berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan, melemahkan daya dukung sosial, serta menghambat keberlanjutan jangka panjang pengembangan destinasi wisata tersebut (Novita et al., 2025).

Transparansi (*Transparantion*)

Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan objek wisata masih belum optimal. Meskipun terdapat pencatatan manual terhadap pendapatan dari tiket masuk dan parkir, namun informasi tersebut tidak tersedia

secara terbuka atau dapat diakses oleh publik maupun pihak luar seperti peneliti. Ketidakterbukaan ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola yang baik, terutama dalam pengelolaan dana publik atau yang bersumber dari masyarakat.

Lebih lanjut, proses pelaporan ke instansi terkait seperti Bapenda memang dilakukan secara berkala, namun ketidakjelasan jumlah pasti yang disetorkan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Ketiadaan dokumentasi tertulis yang bisa diverifikasi membuat sulit untuk memastikan akuntabilitas keuangan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat bentuk tanggung jawab administratif, namun transparansi publik belum sepenuhnya diterapkan, sehingga membuka peluang terjadinya ketidakefisienan atau bahkan penyalahgunaan dana.

Akuantabilitas (*Akuntability*)

Penerapan akuntabilitas oleh pihak pengelola tampaknya telah diupayakan melalui pencatatan manual atas jumlah pengunjung dan pendapatan dari tiket masuk serta parkir kendaraan. Informasi tersebut dicatat dalam buku khusus yang hanya diakses secara internal oleh pengelola dan digunakan untuk menyusun laporan setoran ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dalam praktiknya, pengelola mengakui adanya kewajiban menyetor sebagian pendapatan, yaitu 30% dari total pemasukan, kepada Bapenda secara rutin setiap bulan. Namun, proses pencatatan dan pelaporan ini tidak terintegrasi dengan sistem resmi pemerintah daerah dan lebih bersifat inisiatif pribadi yang tidak terstandarisasi.

Meskipun pengelola telah menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab administratif, akses publik terhadap laporan keuangan tetap tertutup. Peneliti tidak diberikan izin untuk meninjau langsung data laporan, bahkan sekadar untuk tujuan verifikasi akademis. Sikap ini mencerminkan adanya pembatasan dalam transparansi informasi publik, yang berpotensi menghambat praktik *good governance*. Menurut prinsip Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dirumuskan UNDP (1997), seharusnya terdapat mekanisme yang memungkinkan keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat, bukan hanya kepada instansi pemerintah. Dengan demikian, meskipun akuntabilitas internal telah berjalan, belum sepenuhnya didukung oleh transparansi yang terbuka dan akuntabel secara publik (Sarihati et al., 2023).

Pembahasan dan Analisis Teori Dampak Pariwisata (Mathieson & Wall, 1982)

Pengembangan objek wisata Pulau Kumayan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat sekitar, khususnya pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan, penyedia jasa wahana, dan pengelola parkir. Estimasi pendapatan mencapai Rp74 juta selama periode Maret sampai Mei 2025, dengan kontribusi retribusi sebesar 30% yang disetorkan ke pemerintah daerah. Meskipun angka ini mencerminkan potensi ekonomi yang menjanjikan, pencatatan yang masih bersifat manual serta keterbatasan bukti transparansi menunjukkan belum optimalnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan destinasi ini. Menurut Mathieson & Wall (1982), dampak ekonomi dari pariwisata seharusnya bersifat merata, berkelanjutan, dan memperkuat basis ekonomi lokal secara menyeluruh. Dalam hal ini, Pulau Kumayan masih menghadapi tantangan dalam memperluas manfaat ekonomi kepada seluruh masyarakat desa secara inklusif.

Dari aspek sosial budaya, keberadaan wisatawan turut membentuk dinamika baru dalam kehidupan masyarakat lokal. Interaksi yang terjadi antara warga dengan pengunjung dari luar daerah memperluas wawasan sosial dan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan ramah. Namun, terdapat pula kekhawatiran dari sebagian warga terkait perubahan perilaku generasi muda yang mulai mengadopsi gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, seperti cara berbusana atau kebiasaan berduaan di tempat umum. Hal ini sejalan dengan pandangan Mathieson & Wall bahwa pariwisata dapat menggeser norma sosial jika tidak disertai dengan pendekatan edukasi dan kontrol sosial berbasis komunitas. Oleh karena itu, perlu adanya strategi mitigasi berbasis kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan pelestarian nilai budaya (Putri et al., 2023).

Dalam aspek lingkungan, kawasan Pulau Kumayan memiliki potensi alam yang masih alami, dikelilingi hutan bambu dan dekat dengan kawasan konservasi Danau Dendam Tak Sudah. Namun, pertumbuhan kunjungan yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan lingkungan menimbulkan beberapa permasalahan seperti penumpukan sampah, keterbatasan tempat sampah, dan kerusakan fasilitas umum. Beberapa pengunjung juga mengeluhkan fasilitas toilet yang kurang bersih serta akses jalan yang belum memadai. Mathieson & Wall mengingatkan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan merupakan konsekuensi logis dari pengembangan pariwisata tanpa perencanaan ekologis. Dalam konteks ini, Pulau Kumayan membutuhkan sistem zonasi wisata, pembatasan jumlah pengunjung saat puncak musim liburan, serta pelibatan komunitas dalam konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab ekowisata.

Secara keseluruhan, pengembangan Pulau Kumayan telah menunjukkan dampak pariwisata sebagaimana dirumuskan oleh Mathieson & Wall baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Namun, ketiganya masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam sistem tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Ketiadaan mekanisme pelibatan masyarakat secara formal, belum adanya pelatihan sumber daya manusia, serta lemahnya dokumentasi dan evaluasi dampak menjadikan pengelolaan destinasi ini masih bersifat informal dan cenderung reaktif. Ke depan, dibutuhkan pendekatan terpadu berbasis *community based tourism* (CBT) untuk memastikan bahwa seluruh aspek dampak dapat dikelola secara seimbang dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.

Pembahasan dan Analisis Teori Prinsip *Good Governance* (UNDP, 1997)

Berdasarkan prinsip *Good Governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997), aspek partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata Pulau Kumayan tergolong sangat rendah. Masyarakat hanya terlibat secara pasif, seperti menjadi pedagang musiman atau tenaga kerja lepas tanpa memiliki posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan. Tidak ditemukan adanya forum musyawarah atau bentuk kemitraan formal antara masyarakat dan pengelola utama. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip partisipasi yang menekankan pentingnya peran aktif dan bermakna dari warga dalam setiap tahap pengelolaan sumber daya publik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Sementara itu, aspek transparansi dan akuntabilitas berjalan secara parsial. Dari sisi akuntabilitas administratif, pengelola telah menunjukkan itikad baik dengan melaksanakan penyetoran retribusi, pembelian tiket resmi dari Bapenda, serta melakukan pencatatan jumlah pengunjung secara manual. Namun demikian, aspek transparansi masih belum optimal karena informasi tersebut tidak tersedia secara terbuka bagi publik atau peneliti. Akses terhadap data internal yang menyangkut operasional dan keuangan juga sangat terbatas, sehingga menyulitkan pihak luar untuk melakukan pengawasan atau penilaian yang objektif terhadap tata kelola pengelolaan wisata (Setyawati et al., 2025).

Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, peneliti mengedepankan pendekatan kualitatif melalui triangulasi data dari berbagai sumber sebagai bentuk upaya menjaga validitas temuan. Penolakan pengelola untuk membuka dokumen internal dijadikan sebagai catatan kritis mengenai lemahnya transparansi publik dalam pengelolaan wisata. Meski demikian, peneliti tetap menghargai batasan tersebut sebagai bagian dari realitas lapangan yang tidak selalu memungkinkan akses informasi secara menyeluruh. Hal ini

menegaskan pentingnya dorongan terhadap tata kelola yang lebih terbuka dan inklusif guna menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial.

SIMPULAN

Pengembangan berdasarkan prinsip partisipasi, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata Pulau Kumayan masih tergolong rendah dan bersifat pasif. Peran mereka terbatas sebagai pedagang musiman atau tenaga harian tanpa ada ruang formal untuk menyampaikan aspirasi atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi peran antara masyarakat dan pihak pengelola utama, yang bertentangan dengan semangat partisipatif dalam tata kelola yang baik.

Dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, pengelola memang telah melaksanakan kewajiban administratif seperti penyetoran retribusi dan pencatatan pengunjung. Namun, transparansi publik belum sepenuhnya terlaksana, karena data dan informasi penting belum dapat diakses oleh pihak eksternal seperti peneliti atau masyarakat luas. Keterbatasan akses terhadap dokumen internal menunjukkan bahwa sistem pelaporan masih tertutup, sehingga menyulitkan pengawasan publik dan akuntabilitas yang menyeluruh.

Meskipun terdapat hambatan dalam mendapatkan data secara terbuka, peneliti tetap menjaga integritas penelitian melalui pendekatan kualitatif dan triangulasi data dari berbagai sumber. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan temuan meskipun dalam keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta keterbukaan informasi oleh pihak pengelola menjadi catatan strategis agar pengelolaan wisata di Pulau Kumayan dapat berjalan lebih inklusif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Koyan, I. W. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. *Undiksha Singaraja*.
- Maghfiroh, A. R. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Organik (Komposting) oleh Akademi Kompos di Bumi Pesanggrahan Mas RW 08 Kelurahan*

Petukangan Selatan. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif

- Negara, I. D. M. K. S., Negara, F., & Sari, R. J. (2024). Evaluasi Peluang dan Hambatan dalam Mengelola Destinasi Wisata Pantai dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Bisnis*, 3(7), 1169–1178.
- Novita, A. A. A., AP, S., & AP, M. (2025). *Governance for Sustainable Development*. Selaras Media Kreasindo.
- Nurhajati, N. (2018). Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (studi di desa mulyosari kecamatan pagerwojo kabupaten tulungagung). *Publiciana*, 11(1), 1–13.
- Oktaviani, A. B., & Yuliani, E. (2023). Dampak pengembangan pariwisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 1–17.
- Paludai, M. S., Hatu, R. A., Latare, S., & Bumulo, S. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Minanga di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 63–74.
- Putri, I. A., Sari, M., & Cahyani, A. D. (2023). Desa Wisata Brayut sebagai Ruang Interaksi Sosial Wisatawan Asing dan Masyarakat Lokal. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(2), 81–94.
- Ratih, L. D., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan nusantara sebagai upaya membangun rasa dan sikap nasionalisme warga negara: sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 59–64.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sarihati, T., Si, M., Kurniadi, B., Si, M., Rohayati, Y., & Si, M. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Dan Akuntabilitas Publik*. Mega Press Nusantara.
- Sary, F. P., & Santoso, T. I. (2024). Inovasi dalam peningkatan kesadaran dan pengelolaan wisata berbasis komunitas di Desa Tenjolaya untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(6).
- Setyawati, N. P. S. P., Wirantari, I. D. A. P., & Lukman, J. P. (2025). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Retribusi Tiket Entrance Untuk Meningkatkan APBDes Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(1).
- Turambi, J., Lengkong, F. D., & Plangiten, N. (2023). Dampak Kebijakan Pengembangan

Pariwisata Bagi Masyarakat Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 580–587.

Wisata, D. (2018). Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 5(3).

Yakup, A. P. (2019). *Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Universitas Airlangga.